

Pengaruh Moralitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Muhsin

Universitas Tanjungpura
muhsin@ekonomi.untan.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze and obtain empirical evidence about the morality of government apparatus to government accounting fraud exams. The population used is a student majoring in Accounting and Business Pontianak University Tanjungpura, as many as 128 questionnaires. The type of data used is primary data. Data method used is questionnaire. Analytical tool used is WarpPLS 6.0. The results of examination of the morality of the government apparatus have a significant effect on the level of government accounting fraud.*

Keywords: *morality of government apparatus, government accounting fraud, GONE theory, and attribution theory.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang moralitas aparatur pemerintah terhadap ujian penipuan akuntansi pemerintah. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa jurusan Akuntansi dan Bisnis Universitas Pontianak Tanjungpura, sebanyak 128 kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode data yang digunakan adalah kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah WarpPLS 6.0. Hasil pemeriksaan terhadap moralitas aparat pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecurangan akuntansi pemerintah.

Kata kunci: moralitas aparat pemerintah, kecurangan akuntansi pemerintah, teori GONE, dan teori atribusi.

1. PENDAHULUAN

Kasus korupsi banyak terjadi di negara yang sedang berkembang, jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Hasil penelitian Laboratorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, mengungkap 803 kasus menjerat 967 terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi yang tercatat berjumlah 549 dengan 831 terpidana. Namun,

“Update di tahun 2014 seringkali berisi peningkatan putusan-putusan untuk tahun sebelumnya (Maula, 2017).

Adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut biasa disebut dengan *fraud* (kecurangan). *Fraud* merupakan penipuan yang disengaja dilakukan baik perorangan maupun sekelompok pihak yang tidak diketahui oleh pihak yang dirugikan namun memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan *fraud* (Bologna, 1993). *Fraud* dapat disebabkan oleh tiga penyebab yaitu: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga elemen tersebut biasanya disebut sebagai *fraud triangle*. Biasanya *fraud* akan muncul ketika ketiga elemen tersebut muncul secara bersamaan. Dalam perkembangannya Wolfe dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan selain adanya *fraud*

triangle perlu mempertimbangkan elemen keempat yaitu *individual's capability* (kemampuan individu).

Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, secara umum BPK mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 7.594 permasalahan, meliputi 1.393 (18%) kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 6.201 (82%) permasalahan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun. Temua BPK tersebut jelas membuat kita harus bekerja keras bagaimana individu/aparatur dapat bekerja sesuai dengan etika moral yang tinggi.

Semakin tinggi keterlibatan individu dalam hal ini adalah manajer tingkat bawah, maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama tersebut. Namun, keterlibatan manajer tingkat bawah dalam penyusunan anggaran terkadang menimbulkan masalah lain yaitu kecurangan akuntansi atau yang lebih dikenal dengan *fraud* (Aranta, (2013).

Wilopo (2006) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN dan perusahaan terbuka lainnya yang diukur dengan variabel bebas: sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan akuntansi, asimetri informasi dan moralitas manajemen terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variable independen.

Menurut Wilopo, (2006), kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan menyebabkan data dan informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah sangat tidak objektif dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja atau bahkan dalam membuat keputusan. Hal tersebut akan menghambat tercapainya tujuan dari akuntansi pemerintahan, yaitu

(a) menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika,

(b) memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan secara sehat,

(c) membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Sumiati, (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Padang, memperoleh hasil ketaatan akuntansi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, moralitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN di Kota Padang.

Sebuah study CFE (*certified fraud examiner*) dalam Hall, 2001 seorang individu dengan tingkat integritas tinggi dan tekanan (kebutuhan) serta kesempatan terbatas untuk melakukan *fraud* cenderung bersifat jujur, sebaliknya individu yang integritas pribadinya kurang, ketika ditempatkan dalam situasi tekanan kebutuhan meningkat dan diberikan kesempatan cenderung melakukan *fraud* asalkan kebutuhannya terpenuhi.

Dalam Widjaja (1992) alasan yang melatar belakangi kecurangan manajemen adalah manajer tidak mengindahkan moral (*unscrupulous*) mungkin membantu kepentingan yang bertentangan. Dengan mengetahui sifat dan karakteristik manusia yang paling mungkin melakukan kecurangan, pemerintahan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian Aranta, (2013) menunjukkan hubungan negatif moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah moral aparat, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aranta, (2013), dengan menghilangkan variabel asimetris informasi dengan alasan bahwa sektor publik belum familiar dengan variabel asimetris informasi kecuali untuk sektor swasta. Perbedaan riset ini dengan riset Aranta, (2013) adalah pertama pada sampel. Sampel yang digunakan Aranta, (2013) adalah Kepala dan Staf Sub. Bagian Akuntansi/Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sawahlunto, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Mahasiswa Jurusan Akuntansi FEB UNTAN.

Penulis menggunakan mahasiswa sebagai sampel berdasarkan riset Houghton dan Hronsky (1993) menyimpulkan bahwa tidak ditemukan perbedaan signifikan antara struktur faktor individual grup mahasiswa dengan grup praktisi, kesesuaian mahasiswa sebagai surogat untuk praktisi akuntansi pada tugas-tugas yang melibatkan pengukuran sebuah makna. Mereka menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak berpengalaman namun terdidik dan kolega praktisi akuntansi memiliki struktur kognitif yang serupa sehubungan dengan konsep akuntansi. Kedua pada alat analisis. Alat analisis riset Aranta, (2013) menggunakan software SPSS, sedangkan riset ini menggunakan WarpPLS 6.0. Ketiga teori. Aranta, (2013), menggunakan teori GONE dan teori agensi, sedangkan teori dalam riset ini adalah menggunakan teori GONE dan menambah teori baru yaitu teori atribusi.

1.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, Apakah ada pengaruh moralitas aparatur pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori GONE

Kecenderungan kecurangan akuntansi juga dapat dipicu dan dipengaruhi oleh faktor perusahaan

(eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku kecurangan itu sendiri, menurut teori GONE dalam Simanjuntak (2008) terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Opportunity* dan *Exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

Faktor generik berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan dapat dipengaruhi asimetri informasi. Sedangkan *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut dengan faktor individual). Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat dari individu itu sendiri, dalam kaitannya faktor individu ini berhubungan dengan moralitas untuk melakukan kecurangan.

Menurut Teori GONE, Wahyudi (2006) kecenderungan *fraud* juga berasal dari dalam diri individu itu sendiri, salah satunya moralitas. Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat lain "moralis" mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan dengan moral. Moralitas yaitu suatu perbuatan atau perilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan teori GONE diatas, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *Greed* (keserakahan). Dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang, sifat pribadi yang rakus, sudah punya satu bukit, masih ingin bukit yang lainnya, ketikaharta menjadi jembatan menuju kekuasaan, orang terdorong untuk melakukan apa saja untuk menggapainya, termasuk dengan cara melakukan kecurangan (*fraud*).

2.2 Teori Atribusi

Teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. Dalam membuat penilaian terhadap orang lain, persepsi akan dikaitkan dengan teori atribusi. Hal yang sama

dikemukakan Robbins (2003) dalam Maula, (2017) bahwa teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.

Perilaku seseorang dalam organisasi seperti perilaku pimpinan dan perilaku bawahan tidak terlepas dari teori ini. Tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin ataupun orang yang diberikan wewenang disebabkan oleh atribut penyebab. Faktor-faktor seperti pengendalian internal dan kompensasi merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan tersebut.

3. KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Singleton dan Singleton (2010) mendefinisikan kecurangan pertama sebagai suatu kejahatan, dimana kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaihan manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah. Kemudian, kecurangan sebagai suatu kesalahan, dimana kecurangan adalah tindakan yang disengaja dalam memberikan laporan tentang fakta-fakta material yang salah, sehingga seseorang salah dalam mengambil keputusan karena menganggap fakta-fakta itu benar. Terdapat dua jenis kejahatan, yakni:

- (1)Kecurangan sebagai suatu kejahatan. Kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaihan manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah.
- (2)Kecurangan sebagai suatu kesalahan. Kecurangan adalah tindakan yang disengaja dalam memberikan laporan tentang fakta-fakta

material yang salah, sehingga seseorang salah dalam mengambil keputusan karena menganggap fakta-fakta itu benar.

Sawyer et al. (2006) menyebutkan kecurangan adalah serangkaian tindakan-tindakan tidakwajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, kecurangan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengelompokkan kecurangan dalam tiga kelompok.

Kelompok pertama yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

Kelompok kedua adalah penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), yaitu penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung (*defined value*).

Sedangkan kelompok ketiga adalah korupsi, yaitu jenis kecurangan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. Kecurangan jenis ini yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan.

Bentuk-bentuk korupsi bisa berupa penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*). Secara rinci, dapat dibagi menjadi;

- (1)Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk

menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

- (2) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) yaitu penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung (*defined value*).
- (3) Korupsi, yaitu jenis kecurangan ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. Kecurangan jenis ini yang terbanyak terjadi di negara negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Bentuk bentuk korupsi bisa berupa penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

3.2 Moralitas Aparatur Pemerintah

Model Kohlberg merupakan salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika. Kohlberg (1969) menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam perkembangan moral, yaitu tahapan pra-konvensional, tahapan konvensional dan tahapan pasca-konvensional. Liyanarachi (2009) memaparkan bahwa level penalaran moral individu akan mempengaruhi perilaku etis mereka.

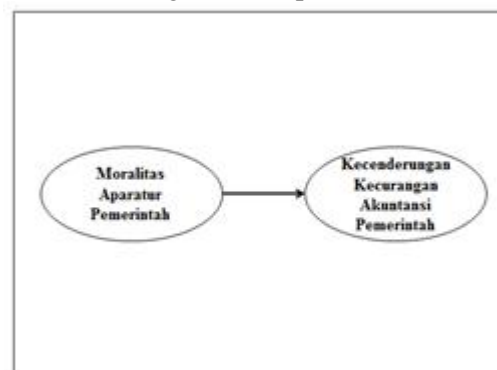
Orang yang mempunyai level penalaran moral yang rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki level penalaran moral yang tinggi di saat mereka menghadapi dilema etika. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, maka individu tersebut semakin mungkin untuk melakukan 'hal yang benar'. Individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada jika berada pada tahapan yang paling rendah (prakonvensional). Selain itu individu pada level

moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan.

Pada tahap kedua (konvensional), individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman dan keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Pada tahap tertinggi (pasca-konvensional), individu mendasari tindakannya dengan memperhatikan kepentingan orang lain dan berdasarkan tindakannya pada hukum-hukum universal. Menurut Rest (2000), semakin tinggi level moral seseorang maka semakin besar kemungkinan mereka melakukan 'hal yang benar'.

3.3 Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang berkaitan dengan moralitas aparatur pemerintah dan kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah, kerangka model penelitian berikut:



Sumber: Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2018.

Gambar 1. Model Penelitian

3.4 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel moralitas aparatur pemerintah dan kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah. Penelitian Moroney dan McDevitt (2008) menyatakan individu dengan level penalaran moral tinggi dalam perbuatannya akan lebih mengedepankan prinsip-prinsip moral yang universal. Sementara itu menurut Puspasari (2012) ada interaksi antara moralitas individu dan pengendalian internal dalam mempengaruhi

kecenderungan akuntansi. Interaksi yang dimaksud merupakan perubahan pada satu level faktor moral atau pada kondisi pengendalian internal akan menyebabkan perubahan individu dalam melakukan kecurangan akuntansi.

Individu dengan moralitas rendah cenderung untuk memanfaatkan kondisi yang tidak terdapat elemen pengendalian internal dalam suatu organisasi untuk kepentingan pribadinya (*self-interest*), seperti tindakan yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi. Kondisi tersebut sesuai dengan tingkatan *level pre-conventional* Kohlberg. Individu dengan moralitas tinggi dalam kondisi tidak terdapat elemen pengendalian internal di organisasi tetap tidak akan melakukan kecurangan akuntansi yang tidak etis dan akan merugikan banyak pihak.

Pada *level moral pre-conventional*, Kohlberg menyatakan bahwa individu yang hanya taat kepada peraturan yang ada karena menghindari sanksi tertentu termasuk dalam tahap yang rendah. Individu dengan moralitas rendah cenderung tidak akan melakukan kecurangan akuntansi dalam kondisi terdapat elemen pengendalian internal karena takut perbuatannya akan terdeteksi oleh pengendalian internal organisasi karena dia takut mendapat sanksi hukum. Hal ini sesuai dengan temuan dari Moroney dan McDevitt (2008) yang menemukan bahwa individu dengan level penalaran moral rendah lebih berorientasi pada peraturan dan sanksi hukum yang mungkin didapatkan.

Penelitian Mazar et al. (2008) tentang kecurangan individu menyatakan bahwa setelah mereka melakukan beberapa percobaan, mereka menyimpulkan ketika seseorang punya kesempatan untuk berbuat curang, mereka akan melakukannya, tetapi tingkat ketidakjujuran perorang relatif rendah. Sejalan dengan Ariely (2013) menyatakan bahwa ketikapartisipan dihadapkan dengan kondisi di mana bisa melakukan kecurangan, partisipan melakukannya pada batas dimana si partisipan merasa nyaman melakukan kecurangan.

Seseorang berani melakukan kecurangan, jika menurut rasionalisasinya tindakan curangnya

tidak akan melukai harga dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh Ayal dan Gino (2011) dan Gino et al.(2009) menyimpulkan bahwa ketika orang memiliki kesempatan untuk curang saat probabilitas untuk tertangkapdan biaya reputasional bisa diminimumkan, maka sebagian besar orang akan berlaku curang. Namun, perbuatan mereka tersebut hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan finansial, tidak sedemikian rupa bisa menciptakan citra negatif bagi diri mereka (Mazar dan dan Ariely, 2006).

Ketika seseorang mengalami dilema etis seringkali akan muncul konflik antara apakah akan berperilaku etis sehingga tetap bisa mempertahankan citra positif diri, atau berperilaku tidak etis agar tetap bisa mendahulukan kepentingan pribadi (Gino et al., 2011). Ketika berhadapan dengan dilema etis seperti itu, orang seringkali memecahkan konflik dengan penilaian-ulang yang kreatif (*creative reassessment*) dan rasionalisasi mau-menang-sendiri (*self-serving rationalization*) (Gino dan Ariely, 2012). Dengan cara ini, orang bisa bertindak dengan tidak jujur demi keuntungan tak etis, namun masih cukup jujur untuk mempertahankan konsep diri yang positif mereka (Gino et al., 2009, Mazar et al., 2008).

Riset Mazar et al. (2008) mengindikasikan bahwa jika seseorang diingatkan pada suatu nilai moral yang seharusnya ia miliki, maka ia tidak akan melakukan kecurangan jika kesempatan untuk melakukan kecurangan itu ada karena pada saat itu ia berada pada level moral yang tinggi. Implisit di dalam simpulan mereka adalah bahwa seseorang yang berada pada level moralitas yang tinggi tidak akan berlaku curang.

Menurut Magnis-Susono dalam Aranta (2013), moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebajikannya sebagai manusia. Magnis-Suseno dalam Aranta, (2013) mengatakan bahwa sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengatakan moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Menurut Amin (2009), kecurangan dapat disebabkan oleh tingkah laku rasionalisasi. Sedangkan menurut Sawyer (2006), salah satu penyebab kecurangan ialah kepribadian yang menggerogoti integritas seseorang. Beberapa orang memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan yang tidak jujur. Ketika orang lain melihat tidak adanya halangan dalam jalan tersebut, maka mereka akan cenderung untuk ikut melakukan kecurangan. Moral atau tingkah laku juga akan menjadi faktor pemicu kecurangan terhadap laporan keuangan. Adanya perubahan tingkah laku atau moral bias menjadikan seseorang menyalahgunakan kas/aktiva yang ada. Penyalahgunaan ini nantinya akan berusaha ditutupi melalui manipulasi terhadap laporan keuangan.

Menurut Bertens (1993), moralitas berasal dari kata sifat latin “moralis” mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan “moral”. Moralitas yaitu suatu perbuatan/prilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan penelitian Wilopo (2006), moralitas manajemen memberikan pengaruh yang signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi atau semakin tinggi tahapan moralitas manajemen semakin manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan perusahaan semata, terlebih kepentingan pribadi.

Menurut Simanjuntak (2008), dalam teori *GONE*, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *greed* (keserakahan). Keserakahan merupakan bentuk moral seseorang yang jelek. Semua orang berpotensi untuk berperilaku serakah karena pada umumnya manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah merasa puas. Jadi kecurangan muncul karena keserakahan dalam diri seseorang. Selain itu, menurut Koletar (2003), penyalahgunaan jabatan merupakan prilaku/moral yang tidak sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan adanya kebiasaan berjudi merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kecurangan seseorang, dimana faktor ini secara langsung berkaitan dengan moral (perbuatan).

Berdasarkan penelitian Sumiati, (2010) moralitas memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Apabila moral manajemen atau pegawai rendah, mereka akan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, dan nantinya untuk menutupi hal tersebut, mereka akan melakukan tindakan seperti memanipulasi data yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Hasil penelitian Aranta, (2013) menunjukkan hubungan negatif moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah moral aparat, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan kerangka model penelitian yang telah dikemukakan diatas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis: Moralitas Aparatur Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah.

4. METODE PENELITIAN

4.1 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sekaran (2006) adalah mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi FEB UNTAN Pontianak, Kalimantan Barat.

Sampel menurut Sekaran (2006) adalah sebagian dari populasi, sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semua, elemen populasi akan membentuk sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah auditing FEB UNTAN Pontianak, Kalimantan Barat.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara nonprobabilitas atau secara tidak acak dengan jenis (*purposive sampling*) yaitu

pemilihan sampel bertujuan atau target tertentu dalam memilih sampel tidak acak. Dimana salah satu jenis dari (*purposive sampling*) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang dikembangkan karena peneliti menyadari bahwa yang memiliki informasi baik dan benar mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah.

4.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

4.3 Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah

Menurut Aranta (2013), kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) adalah serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu, kecurangan dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan uang, kekayaan, atau jasa untuk kepentingan sendiri dan merugikan pemerintah. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah terdiri dari 14 (empat belas) item pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti Aranta (2013) dengan skala Likert 1-5.

4.4 Moralitas Aparatur Pemerintah

Menurut Aranta (2013) moralitas yang mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korup. Instrumen yang digunakan untuk mengukur moralitas aparat pemerintah 6 (enam) item pertanyaan yang dikembangkan oleh peneliti Aranta (2013) dengan skala Likert 1-5.

4.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini

adalah model persamaan struktural dengan pendekatan varians atau berbasis komponen atau yang dikenal dengan *Partial Least Squares*. Metode ini digunakan karena cukup kuat karena tidak didasarkan banyak asumsi, data tidak harus berdistribusi normal, dan juga data dengan skala kategorial, ordinal, interval hingga rasio dapat digunakan dalam model serta sampel tidak harus besar. Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data penelitian untuk menguji hipotesis yaitu Warp PLS 6.0.

4.6 Tahapan Analisis Model Penelitian

Dalam analisis statistik menggunakan SEM (*Structural Equation Model*), sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian atas model yang diusulkan. Tahapan persamaan struktural yang dilakukan adalah sebagai berikut:

4.6.1 Pengembangan Model Berbasis Teoritis

Pada bagian terdahulu telah didiskusikan teori yang digunakan sebagai dasar membangun model teoritis pengaruh moralitas aparat pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah.

Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan:

- (1) *inner model* yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*),
- (2) *outer model* yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*measurement model*), dan
- (3) *weight relation* dimana nilai kasus dari variabel laten dapat diestimasi.

Tanpa kehilangan generalisasi, dapat diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau manifest variabel di skala *zero means* dan *unit variance* (nilai standardized) sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dalam model.

4.6.2 Outer Model

Outer model sering juga disebut (*outer relation* atau *measurement model*) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya.

4.6.3 Inner Model

Inner model yang kadang disebut juga dengan (*inner relation*, *structural model*, dan *substantive theory*) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan *substantive theory*.

4.6.4 Weight Relation

Inner atau *outer model* memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasi algoritma PLS. Kita memerlukan definisi *weight relation*. Nilai kasus untuk setiap variabel laten diestimasi dalam PLS.

4.6.5 Evaluasi Model

PLS tidak mengasumsikan adanya distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk menguji signifikansi parameter tidak diperlukan (Chin, 1998).

Model evaluasi PLS berdasarkan pada pengukuran prediksi yang mempunyai sifat nonparametrik. Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk blok indikator. Sedangkan *outer model* dengan formatif indikator dievaluasi berdasarkan pada *substantive content*-nya yaitu dengan membandingkan besarnya relatif *weight* dan melihat signifikansi dari ukuran *weight* tersebut (Chin, 1998).

5. PEMBAHASAN

5.1 Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan menggunakan program WarpPLS 6.0.

Tabel 1: Latent Variabel Coefficient

Keterangan	MOAP	KKAP
<i>R-squared</i>		0.040
<i>Adj. R-squared</i>		0.032
<i>Composite reliab.</i>	0.534	0.771
<i>Cronbach's alpha</i>	0.557	0.600
<i>Avg. Var. Extrac.</i>	0.479	0.514
<i>Full collin. VIF</i>	1.041	1.041
<i>Q-squared</i>		0.045

Sumber: Output Olah Data WarpPLS 6.0. (2018).

Tabel 1 di atas menunjukkan *Ajusted R-squared* untuk kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah (KKAP) sebesar 0.040, artinya untuk variabel kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah (KKAP) dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel moralitas aparatur pemerintah (MOAP) dalam menjelaskan variasi variabel kriteria adalah sebesar 40% dan sisanya 60% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai *Ajusted R-squared* dalam penelitian ini masuk pada kategori menengah (Ghozali dan Latan, 2014).

Sedangkan *Ajusted R-squared* untuk moralitas aparatur pemerintah (MOAP) sebesar 0.032, artinya untuk variabel kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah (KKAP) dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel moralitas aparatur pemerintah (MOAP) dalam menjelaskan variasi variabel kriteria adalah sebesar 32% dan sisanya 68% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Nilai *Ajusted R-squared* dalam penelitian ini masuk pada kategori kuat (Ghozali dan Latan, 2014).

Kedua variabel dalam model penelitian ini mempunyai nilai reliabilitas yang sedang.. Hal ini dapat dilihat dari nilai *cronbach alpha* yang terdapat pada tabel 1, memiliki nilai di atas > 0.50-> 0.70, (Ghozali, 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi tingkat reliabilitas konsisten internal.

Berikutnya, nilai *full colinearity variance inflation factor* (VIF) untuk setiap konstruk/variabel juga sangat baik yaitu < 3.3 sehingga tidak terdapat problem vertikal maupun *lateral collinearity* di dalam model penelitian ini. Terakhir koefisien *Q-squared* dalam penelitian ini menghasilkan nilai di atas/lebih

besar dari nol yaitu untuk variabel kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah (KKAP) sebesar 0.045, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memiliki nilai validitas *predictive relevance* yang layak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2:
 Deskripsi Pengukuran *Model Fit*

No	Hasil Uji/Parameter	Nilai Hitung	Cut-Off Value	Kriteria/ Kesimpulan
1	<i>Average Path Coefficient</i> (APC)	0.199, P = 0.001	P < 0,05	Model Fit
2	<i>Average R-Squared</i> (ARS)	0.040, P < 0.143	P < 0,05	Model Fit
3	<i>Average adjusted R-squared</i> (AARS)	0.032, P < 0.162	P < 0,05	Model Fit
4	<i>Average full collinearity VIF</i> (AFVIF)	1.041	<i>acceptable if < 5, ideally < 3.3</i>	Model Fit
5	<i>Tenenhaus GoF</i> (GoF)	0.140	<i>Small > 0.1, Medium > 0.25, large > 0.36</i>	Model Fit

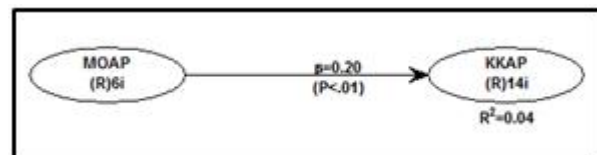
Sumber: Hasil WarpPLS 6.0 (2018)

5.2 Hasil Dan Pembahasan

5.2.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini dilakukan di Pontianak engan objek penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNTAN. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa jurusan akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah auditing. Kuesioner yang didistribusikan sejumlah 155 eksemplar, setelah batas waktu terkumpul kuesioner 150 eksemplar. 150 eksemplar kuesioner kemudian di *screening*, dan terdapat 22 kuesioner yang jawaban tidak lengkap sehingga kuesioner yang bisa diolah selanjutnya adalah 128 eksemplar. Responden *rate* penelitian ini adalah sebesar 82.58% persen, responden *rate* penelitian ini diatas responden rata-rata untuk penelitian sosial di Indonesia yang hanya 10-20% (Indriantoro & Supomo, 2007).

Mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 44 mahasiswa berjenis kelamin pria, dan 84 mahasiswa berjenis kelamin perempuan, mayoritas angkatan 2014 yaitu berjumlah 124 mahasiswa, sisanya 4 orang mahasiswa angkatan tahun 2013.



Sumber: Hasil Olah Data WarpPLS 6.0 (2017).

Gambar 2. Model Hasil Penelitian

Hasil *output General SEM analysis results* yang tersaji pada Tabel 1 dan Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi tingkat validitas

dan reliabilitas konsisten internal dan model yang digunakan dalam penelitian ini, dengan demikian

bahwa model riset yang digunakan dalam riset ini adalah *fit/baik*.

Tabel 3: Hasil Riset

Hipotesis	Uraian Hipotesis	Hasil
H	Moralitas Aparatur Pemerintah (MOAP) berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah (KKAP).	Diterima

Sumber: Data Primer diolah (2018).

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa Moralitas Aparatur Pemerintah (MOAP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah (KKAP). dengan estimasi = 0,20 dan $p < 0,01$, diterima.

Dengan demikian bahwa semakin tinggi moralitas aparat yang dimiliki aparat maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah juga akan semakin menurun. Hasil penelitian ini konsisten dengan Amrizal (2004;24), moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan, jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Amrizal (2004) juga mengemukakan kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral menyuburkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya dapat merusak bahkan menghancurkan organisasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi moralitas aparat maka semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan kecurangan akuntansi.

Menurut teori *GONE* terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Opportunity* dan *Exposure* berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

Faktor umum berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan dapat dipengaruhi moralitas aparat pemerintah. Sedangkan *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut dengan faktor individual). Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat dari individu itu sendiri, dalam kaitannya faktor individu ini berhubungan dengan moralitas untuk melakukan kecurangan.

Teori *GONE* kecendrungan *fraud* juga berasal dari dalam diri individu itu sendiri, salah satunya moralitas. Moralitas yaitu suatu perbuatan atau perilaku baik ataupun buruk. Berdasarkan teori *Gone* diatas, faktor pendorong seseorang melakukan kecurangan yang disebabkan oleh moral yaitu *Greed* (keserakahan). Dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang, sifat pribadi yang rakus, sudah punya satu bukit, masih ingin bukit yang lainnya, ketika harta menjadi jembatan menuju kekuasaan, orang terdorong untuk melakukan apa saja untuk menggapainya, termasuk dengan cara melakukan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini konsisten dengan Wilopo (2006) moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta penelitian yang dilakukan Anggraini (2008), moralitas signifikan negatif terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau

sebab perilakunya. Perilaku seseorang oleh kombinasi antara kekuatan internal dan eksternal. teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.

Terakhir hasil penelitian ini konsisten dengan riset Aranta (2013) yang menguji pengaruh moralitas aparat terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini mempunyai makna bahwa moralitas aparat pemerintah yang tinggi akan mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah. Moralitas aparat pemerintah perlu dijaga dan ditingkatkan supaya kecurangan akuntansi pemerintah semakin menurun dan bahkan tidak terjadi kecurangan akuntansi.

6. SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif moralitas aparat pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah, yang berarti semakin tinggi moralitas aparat pemerintah, maka kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya apabila moralitas aparat pemerintah yang rendah maka kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah akan semakin tinggi pula.

6.2 Keterbatasan

Variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 32%. Sedangkan 68% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat model riset ini. Sehingga hasil belum bisa digeneralisasi untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap

kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah. Kedua, penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam riset berikutnya bisa menggunakan metode kualitatif dan eksperimen.

6.3 Saran

Saran kepada peneliti yang akan datang sebagai berikut:

- (a) mereplikasi model penelitian ini dan selanjutnya mengujikan pada penyusun dan pengguna laporan keuangan dan akuntansi di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kalbar, karena mereka adalah penyusun laporan keuangan.;
- (b) mempertimbangkan variasi variabel kriteria yang lain seperti variabel pengendalian internal dan komitmen kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin Widjaja. 1992, *Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [2] Amrizal. 2004, *Pencegahan dan Pendektesian Kecurangan Oleh Internal Auditor*, Melalui (www.google.com), Diakses [2017-07-10].
- [3] Anggraini, Arie Aviora. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur di Sumatera Barat*, Skripsi S1, FE UBH.
- [4] Ayal, S. Dan F. Gino. 2011, *Honest Rationales for Dishonest Behavior. In: Mikulincer, M., Shaver, P.R. (Editor), The Social Psychology of Morality, Exploring The Causes of Good and Evil*, American Psychological Association, Washington, DC.
- [5] Aranta, Petra Zulia. 2013, *Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap*

- Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto)*, Skripsi Universitas Negeri Padang, Padang. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/116/103>
- [6] Ariely, D. 2013, *The Honest Truth About Dishonesty - TAM 2013*, <https://www.youtube.com>
- [7] Bertens, K.1993, *Etika*, Gramedia, Jakarta.
- [8] Bologna, G Jack., Robert J.Lindquist and Joseph T.Wells. 1993, *Investigation Audit, Fourth Edition*, Prentice-Hall&New Jersey.
- [9] Ghozali, I. 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP UNDIP, Semarang.
- [10] Gino, F., S. Ayal., dan D. Ariely. 2009, *Contagion and Differentiation in Unethical Behavior: The Effect of One Bad Apple on The Barrel*, *Psychological Science*, 20 (3), 393-398.
- [11] Ghozali, I. dan Hengky Latan. 2014, *Partial Least Squares Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program Warp PLS 4.0*, BP-UNDIP, Semarang.
- [12] Houghton, K.A. dan J. J. F. Hronsky. 1993, *The Sharing of Meaning Between Accounting Students and Members of The Accounting Profession*, *Accounting and Finance*, 33 (2), 131-147.
- [13] Hall, James A. 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, PT Salemba Empat, Jakarta.
- [14] Kohlberg, L. 1969, *Stage and Sequence: The Cognitive-Development Approach Moral Action to Socialization. In D. A. Goslin (Ed)*, *Handbook of Socialization Theory and Research*, RandMcNally, Chicago.
- [15] Koletar, Joseph. W. 2003, *Fraud Exposed*, John Wiley and Sons, Inc, New York.
- [16] Liyanarachi, G. dan C. J. Newdick. 2009, *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New-Zealand Evidence*, *Journal of Business Ethics*, 89 (1), 37-57.
- [17] Maula, Kholida Atiyatul. 2017, *Analisis Pengaruh Faktor- Faktor Pendorong Tindak Kecurangan Terhadap Kecendrungan Aparatur Pemerintah Melakukan Fraud (Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Banyumas)*, Vol. 2 No. 01, *Jurnal Accountink*, Unikal.
- [18] Mazar, N. dan D. Ariely. 2006, *Dishonesty in Everyday Life and Its Policy Implication*, *Journal of Public Policy and Marketing*, 25 (1), 117-126.
- [19] Mazar, N, O. Amir dan D. Ariely. 2008, *The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self-Concept Maintenance*, *Journal of Marketing Research* Vol. XLV (December 2008), 633–644.
- [20] Moroney, J. J. dan R. E. McDevitt. 2008, *The Effects of Moral Reasoning on Financial Reporting Decisions in a Post Sarbanes Oxley Environment*, *Behavioral Research of Accounting, Behavioral Research in Accounting*, 20 (2) 89-110
- [21] Puspasari, N. 2012, *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintahan Daerah*, Tesis, Universitas Gajah Mada.
- [22] Rest, J. R. 2000, *A Neo-Kohlbergian Approach To Morality Research*, *Journal of Moral Education*, 29 (4), 381-395.
- [23] Sawyer, L. B., M. A. Dittenhofer dan J. H. Scheiner. 2006, *Internal Auditing, Diterjemahkan oleh: Ali Akbar, Jilid 3, Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta.
- [24] Sekaran, Uma. 2006, *Metedologi Penelitian*

Bisnis, BPFE, Yogyakarta.

- [25] Simanjuntak, Ridua. 2008, “*Kecurangan: Pengertian dan Pencegahan*” (diunduh dari www.asei.co.id/internal/docs/AseiKecurangan.docs); [05/02/12].
- [26] Singleton, T. W. dan A. J. Singleton. 2010, *Fraud Auditing dan Forensic Accounting, 4 Edition*, John Wiley dan Son Inc, New Jersey.
- [27] Sumiati, Friskila Rini. 2010, *Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Badan Usaha Milik Negara di Padang*, Skripsi S1, FE UNP, Padang.
- [28] Wolfe, David T., Dana R. Hermanson. 2004, *The Fraud Diamond: Considering The Four Elements of Fraud*, The CPA Journal, p.38-42.
- [29] Wilopo. 2006, *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9, Padang, 23 – 26 Agustus 2006.
- [30] Wahyudi “*Fraud, Apa dan Mengapa?*”, Diunduh dari http://internal.dsuc.co.id/fraud_apa_dan_mengapa?, on Fri 2012-03-10 10:09.